

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pembahasan Analisis Isi Berita Kompas.com Mengenai Ujaran Kebencian Menjelang Pilpres 2019.

Pada bab ini peneliti akan menganalisis isi berita kompas.com mengenai ujaran kebencian pada masa kampanye (23 September 2018 - 14 April 2019) menjelang pilpres 2019. Peneliti menggunakan fokus analisis isi dari teori Holsti, karena Holsti mengkolaborasikan elemen-elemen analisis isi sehingga bisa diaplikasikan secara praktis. Sekaligus sebagai jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah sebelumnya, yaitu bagaimana isi berita dari Kompas.com mengenai ujaran kebencian dalam masa kampanye 23 September 2018 sampai 14 April 2019, menjelang pilpres 2019 ditinjau dari teori Analisis Isi oleh model Holsti. Untuk menilai suatu berita yang mempunyai karakteristik pesan sebagaimana diuraikan dalam teori Holsti yaitu mengandung unsur *what, how, dan to whom*.

Peneliti mendapatkan tujuh berita sebagai bahan objek penelitian yang termasuk dalam kategori pemberitaan mengenai ujaran kebencian pada masa kampanye menjelang pilpres 2019 di media *online* Kompas.com menggunakan teknik analisis isi yang telah diuraikan pada kerangka teori. Berikut adalah tujuh berita pada media *online* Kompas.com :

1. Berita I “Bawaslu : 90 Daerah Rawan Tinggi Isu Ujaran Kebencian dan SARA”

Isi berita dalam Kompas.com dibawah ini yaitu, informasi yang disampaikan oleh pihak Bawaslu mengenai 90 daerah rawan akan tingginya isu ujaran kebencian dan SARA di Indonesia menjelang pesta demokrasi pemilu 2019.

Adapun berita selengkapnya sebagaimana tertulis ;

JAKARTA, KOMPAS.com - Bawaslu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019. Salah satu yang dipotret dalam IKP adalah kerawanan ujaran kebencian dan SARA di seluruh Indonesia.

"Iya SARA dan ujaran kebencian selalu menjadi kerawanan laten muncul dalam pemilu," ujar Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin saat memaparkan IKP 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Berdasarkan IKP 2019, sebanyak 90 daerah atau 17,5 persen dari kabupaten atau kota seluruh Indonesia masuk dalam kategori rawan tinggi isu ujaran kebencian dan SARA di pemilu 2019. Sementara itu, sisanya 424 daerah atau 82,5 persen kabupaten kota masuk kategori rawan sedang.

Pengukuran kerawanan isu ujaran kebencian dan SARA didasarkan pada tiga subdimensi yang dibuat Bawaslu.

Ketiganya, yakni relasi kuasa dengan tingkat lokal, kampanye dan partisipasi pemilih.

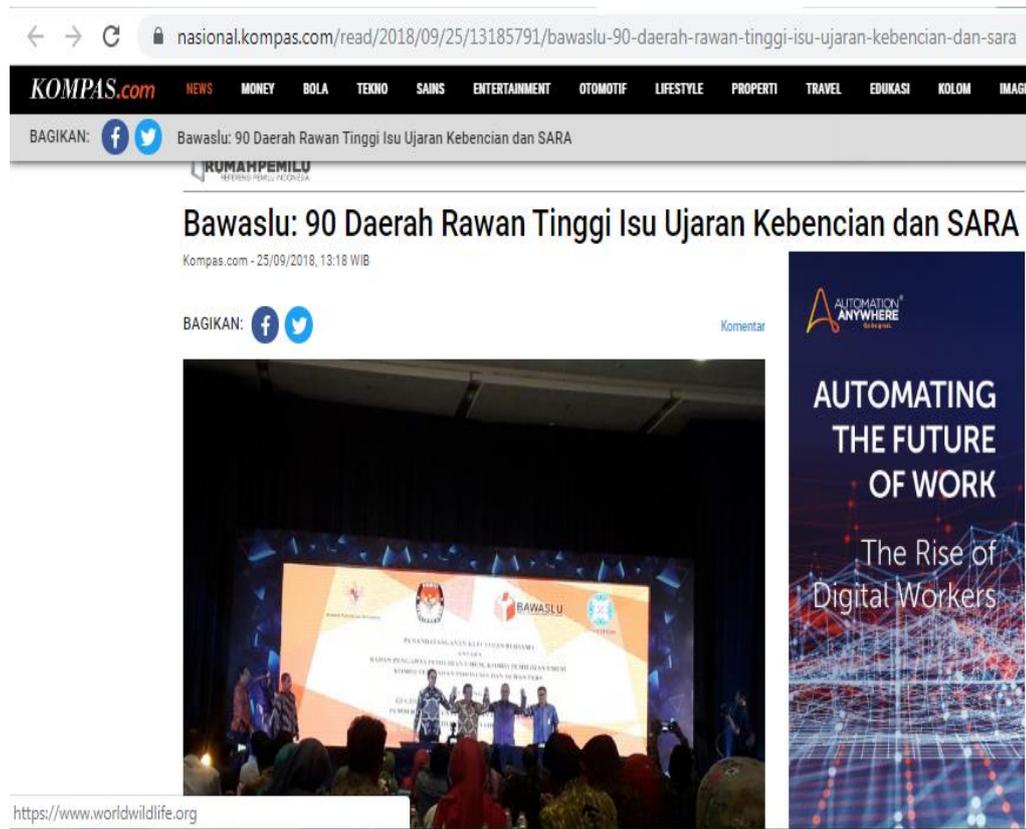
Untuk mengukur indeks kerawanan, Bawaslu membuat 3 ukuran skoring, yakni 0-33 untuk kerawanan rendah, 33,01-66 untuk kerawanan sedang dan 66,01-100 untuk kerawanan tinggi.

Menindaklanjuti rawannya ujaran kebencian dan isu SARA dalam pemilu 2019, Bawaslu membuat sejumlah rekomendasi.

Diantaranya meminta peserta pemilu melakukan kampanye bersih dengan menghindari politisasi SARA.

Selain itu, Bawaslu juga meminta kementerian dan lembaga untuk melakukan supervisi terhadap kepala aparat pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan demokratis dan berkualitas.

Berita ini di terbitkan oleh Kompas.com pada Selasa, 25 September 2018 pukul 13.18 WIB, dan diakses pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul 16.58 WIB.



Gambar 4 “Bawaslu : 90 Daerah Rawan Tinggi Isu Ujaran Kebencian dan SARA”
Sumber : nasional.kompas.com

a. “Bawaslu : 90 Daerah Rawan Tinggi Isu Ujaran Kebencian dan SARA”

1) Deskripsi Karakteristik Pesan Berita I

a) *What?*

Unsur *what* pada berita diatas menjelaskan bahwa SARA dan ujaran kebencian selalu menjadi kerawanan laten yang

muncul dalam pelaksanaan pemilu 2019, terutama pada 90 daerah di Indonesia yang masuk dalam kategori pengukuran kerawanan isu ujaran kebencian dan SARA yang di dasarkan pada tiga subdimensi yang dibuat Bawaslu. Ketiganya, yakni relasi kuasa dengan tingkat lokal, kampanye dan partisipasi pemilih.

b) *How?*

Unsur *how* dalam berita ini bahwasannya Bawaslu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019. Berdasarkan IKP 2019, sebanyak 90 daerah atau 17,5 persen dari kabupaten atau kota seluruh Indonesia masuk dalam kategori rawan tinggi isu ujaran kebencian dan SARA di pemilu 2019. Sementara itu, sisanya 424 daerah atau 82,5 persen kabupaten atau kota masuk kategori rawan sedang. Untuk mengukur indeks kerawanan, Bawaslu membuat 3 ukuran skoring, yakni 0-33 untuk kerawanan rendah, 33,01-66 untuk kerawanan sedang dan 66,01-100 untuk kerawanan tinggi. Pengukuran kerawanan isu ujaran kebencian dan SARA berdasarkan tiga subdimensi yakni, relasi kuasa dengan tingkat lokal, kampanye dan partisipasi pemilih.

c) *To Whom?*

Unsur *to whom* pada berita diatas ditujukan atau dihimbau kepada seluruh peserta pemilu, serta kementerian dan

lembaga untuk melakukan supervisi terhadap kepala aparat pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan demokratis dan berkualitas dan melakukan kampanye bersih dengan menghindari politisasi SARA.

2) Analisis Isi Pesan Pada Berita I

Pesan dalam berita melalui *statement* ini, yaitu suatu informasi mengenai tingginya isu ujaran kebencian dan SARA pada pemilu di tahun 2019. Bawaslu membuat sejumlah himbauan diantaranya meminta peserta pemilu melakukan kampanye bersih dengan menghindari politisasi SARA, selain itu Bawaslu juga menghimbau kepada aparat pemerintahan dan aparat penegak hukum untuk memastikan pemilu berjalan demokratis dan berkualitas. Dalam hal ini terdapat 90 daerah yang termasuk dalam kategori ujaran kebencian. Peneliti melihat pada berita dengan judul *Bawaslu : 90 Daerah Rawan Tinggi Isu Ujaran Kebencian dan SARA* bahwa berita ini bersifat informatif karena, masyarakat atau pembaca mengetahui adanya ujaran kebencian pada pilpres 2019 di 90 daerah yang ada di Indonesia. Serta dengan adanya berita ini juga memberikan efek kepada masyarakat agar diharapkan tidak ikut tergerus dan menambah daftar sebagai daerah yang ikut melakukan isu ujaran kebencian

dan SARA di kalangan masyarakat yang dapat merugikan peserta pemilu.

2. Berita II “Prabowo : Jangan Sebar Ujaran Kebencian”

Isi berita dalam Kompas.com dibawah ini yaitu, informasi serta himbauan dari calon presiden no urut 02 Prabowo Subianto meminta agar para pendukungnya untuk tidak menyebar tindakan ujaran kebencian baik di media sosial maupun ditempat lainnya.

Adapun berita selengkapnya sebagaimana tertulis ;

SUKABUMI, KOMPAS.com — Calon Presiden RI Prabowo Subianto meminta para pendukung untuk tidak menyebarkan ujaran kebencian, baik di media sosial maupun di tempat lainnya.

"Saya merasa terharu dengan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat, namun demikian untuk berjuang memenangkan Pilpres 2019 mendatang seluruh pendukung agar tidak sebar ujaran kebencian," katanya saat di Sukabumi, Minggu.

Dalam perhelatan Pilpres ini, Prabowo mengajak seluruh pendukungnya untuk santun dalam menyampaikan berbagai informasi. Namun, lanjut dia, mereka juga jangan lengah dan harus mengawal terus pelaksanaan pilpres ini.

Prabowo juga mengaku, setiap hari dia selalu berdoa agar tidak berkhianat kepada rakyat jika nanti dipercaya rakyat. Segala amanat yang diberikan harus dilakukan sebaik mungkin, khususnya dalam membangun ekonomi.

Setiap kali datang ke tengah masyarakat, Prabowo selalu melihat pandangan rakyat yang menaruh harapan kepada dirinya. Bahkan dari sentuhan tangan dari rakyat, orang nomor satu di Partai Gerindra tersebut mengaku merasakan kepercayaan dari masyarakat.

"Saya sekarang merasakan dukungan dari rakyat ada harapan besar untuk perubahan serta perbaikan. Setiap kali saya berada di kalangan masyarakat selalu merasakan getaran jiwa, hasrat pandangan mata memberitahukan kepercayaan besar kepada saya," tambahnya.

Prabowo menuturkan, rakyat harus cukup pangan, ekonomi harus untuk rakyat bukan rakyat untuk ekonomi. Selain itu, sumber kekayaan alam harus dikelola sebaik mungkin, bukan dijual murah ke bangsa asing.

"Ini perjuangan saya dan hingga saat ini masih terus berjuang, bukan karena haus kekuasaan, tetapi haus keadilan. Apalagi, para alim ulama selalu memberi tahu bahwa tugas pemimpin ada dua yakni satu tidak boleh membiarkan kemiskinan berlanjut dan harus menghilangkan kemiskinan serta menegakkan keadilan," katanya.

Berita ini diterbitkan oleh Kompas.com pada Senin, 08 Oktober 2018 pukul 07.50 WIB, dan diakses pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul 17.03 WIB.



Gambar 5 “Prabowo : Jangan Sebar Ujaran Kebencian”
Sumber : nasional.kompas.com

b. “Prabowo : Jangan Sebar Ujaran Kebencian”

1) Deskripsi Karakteristik Pesan Berita II

a) *What?*

Pada berita diatas unsur *what* dapat dilihat dari judul dan juga *lead* berita yang menjelaskan calon presiden RI Prabowo Subianto meminta para pendukung untuk tidak menyebarkan ujaran kebencian baik di media sosial maupun ditempat lainnya. Himbauan itu dilihat dari *statement* yang diungkapkan oleh Prabowo pada berita tersebut yaitu “*Saya merasa terharu dengan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat, namun demikian untuk berjuang memenangkan pilpres 2019 mendatang seluruh pendukung agar tidak sebar ujaran kebencian,*”

b) *How?*

Pemberitaan di atas unsur *how* menerangkan bahwa di perhelataan pilpres tahun 2019 Prabowo mengajak seluruh pendukungnya untuk santun dalam menyampaikan berbagai informasi. Namun prabowo juga menghimbau agar pendukungnya jangan lengah dan harus mengawal terus pelaksanaan pilpres ini.

c) *To Whom?*

Unsur *to whom* terlihat dengan jelas pesan yang ingin disampaikan Prabowo ditujukan kepada pendukungnya.

Dari kalimat aktif di berita pada paragraf ke-2 di Kota Sukabumi pada hari minggu. Prabowo menghimbau kepada seluruh pendukungnya agar tidak sebar ujaran kebencian.

2) Analisis Isi Pesan Pada Berita II

Karakteristik pesan yang ingin disampaikan pada berita ini sudah jelas karena mengandung unsur *what*, *how* dan *to whom*. Berita ini bersifat deskriptif, karena dalam berita ini menyajikan penjelasan yang cukup kompleks dari Prabowo salah satunya yaitu kutipan pada paragraf kedua “*Saya merasa terharu dengan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat, namun demikian untuk berjuang memenangkan pilpres 2019 mendatangi seluruh pendukung agar tidak sebar ujaran kebencian.*” Katanya saat di Sukabumi, Minggu. Dari kutipan tersebut Prabowo mencoba menghimbau agar para pendukungnya untuk tidak menyebarkan ujaran kebencian, baik di media sosial maupun di tempat lainnya dan mengajak seluruh pendukungnya untuk santun dalam menyampaikan berbagai informasi, serta jangan lengah dan harus mengawal terus pelaksanaan pilpres ini. Dengan adanya pemberitaan ini juga memberikan efek kepada masyarakat terkhusus pendukungnya agar dihimbau lebih bijak dalam menggunakan sosial media dan tidak melakukan tindakan ujaran kebencian menjelang pilpres 2019.

3. Berita III “Hoaks Polisi Dukung Salah Satu Capres, Polri Tegaskan Netral dalam Pemilu 2019”

Isi berita dalam Kompas.com dibawah ini yaitu, Polri menegaskan kepada masyarakat bahwa pihaknya bersifat netral dalam pemilu 2019 dan narasi yang beredar mengatakan Polri mendukung salah satu capres adalah hoaks.

Adapun berita selengkapnya sebagaimana tertulis ;

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menegaskan, Polri menjaga netralitas dalam Pemilu 2019. Hal ini dikatakan Dedi menanggapi menyebarnya foto anggota Polri yang disebut mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Polri memastikan bahwa narasi yang beredar bersama foto itu adalah hoaks.

Pada foto yang beredar, narasi yang disematkan sebagai berikut:

"Dapat dri grub suruh nyebarin biar merinding penjilat2 yg main curang. KAMI POLRI SIAP MENGAWAL SUARA PRABOWO-SANDI DI PILPRES 2019. DEMI MENJAGA KEAMANAN NEGARA NKRI BAGAIMANA PENDUKUNG PRABOWO-SANDI APA SIAP MENGAWAL SUARA 02 DEMI MENUJU PERUBAHAN."

Foto ini diunggah pada 12 November 2018 dan telah dibagikan lebih dari 400 kali. Dedi menjelaskan, foto tersebut memperlihatkan sejumlah siswa Sekolah Polisi Negara di Mojokerto, Jawa Timur dalam sebuah aktivitas.

“Itu program yang sudah dibuat oleh Polda Jatim dan bukan baru sekali ini, sudah sekian kali. Salah satu yang mengisi beragama Islam adalah Mantan Kapolda Jawa Timur Komjen (Purn) Anton Bachrul Alam, kita pastikan hoaks enggak ada,” ujar Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (19/11/2018).

“Pak Kapolri dalam setiap kesempatan menyampaikan bahwa Polri menjunjung tinggi netralitas dalam Pemilu (2019),” lanjut dia. Dedi menyebutkan, tim siber Polri sudah melacak mereka yang menyebarkan foto dan narasi hoaks itu.

Untuk meminimalisasi penyebaran informasi-informasi yang menyesatkan ini, Polri telah bekerja sama dengan pihak terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Kami juga sudah bekerja sama dengan Kominfo. Akun yang betul-betul menyebarkan akun-akun hoaks itu langsung kami minta pemblokiran maupun take down dari Kominfo langsung,” kata Dedi. Selain itu, kata Dedi, Polri juga menjalin kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara untuk melakukan kanalisasi berita hoaks dan ujaran kebencian.

Berita ini diterbitkan oleh Kompas.com pada Selasa, 19 November 2018 pukul 15.07 WIB, dan diakses pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul 17.08 WIB.



Gambar 6 “Hoaks Polisi dukung Salah Satu Capres, Polri Tegaskan Netral dalam Pemilu 2019”

Sumber : nasional.kompas.com

c. Berita III “Hoaks Polisi dukung Salah Satu Capres, Polri Tegaskan Netral dalam Pemilu 2019”

1) Deskripsi Karakteristik Pesan Berita III

a) *What?*

Unsur *what* pada berita diatas tentang menyebarnya foto Polri yang disebut mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun, Polri memastikan bahwa narasi yang beredar bersama foto itu adalah hoaks.

b) *How?*

Unsur *how* pada berita diatas yaitu Polri, Dedi Prasetyo mengkonfirmasi bahwa narasi yang beredar melalui foto berisi seperti berikut “*Dapat dari grub suruh nyebarin biar merinding penjilat2 yg main curang. KAMI POLRI SIAP MENGAWAL SUARA PRABOWO-SANDI DI PILPRES 2019. DEMI MENJAGA KEAMANAN NEGARA NKRI BAGAIMANA PENDUKUNG PRABOWO-SANDI APA SIAP MENGAWAL SUARA 02 DEMI MENUJU PERUBAHAN.*” Kapolri menegaskan bahwa foto yang di unggah pada 12 November 2018 ini dipastikan hoaks dan tidak benar seperti yang dikatakan di gedung Mabes Polri Jakarta Selatan dan menyampaikan Polri menjunjung tinggi netralitas dalam pemilu 2019.

c) To Whom?

Aparat kepolisian bersifat netralitas dalam pemilu, tidak ada keterpihakan kepada calon presiden baik pada kubu 01 maupun kubu 02. Dan berita ini ditujukan kepada masyarakat agar tidak mudah percaya kepada narasi-narasi yang beredar, tentu dalam pemilu aparat kepolisian hanya bertugas untuk menjaga keamanan sehingga pemilu 2019 dapat berjalan dengan lancar.

2) Analisis Isi Pesan Pada Berita III

Karakteristik pesan pada berita ini bersifat informatif, karena Polri memberikan pemberitahuan dan informasi kepada masyarakat atau pembaca bahwa narasi yang beredar pada foto tersebut adalah hoaks. Serta, Polri telah bekerja sama dengan pihak terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk meminimalisasi penyebaran informasi yang menyesatkan tersebut. Selain itu, Polri juga menjalin kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara untuk melakukan kanalisasi berita hoaks dan ujaran kebencian. Dengan adanya pemberitaan ini pembaca mengetahui bahwa berita yang menyebar selama ini adalah hoaks dan memberikan efek kepada masyarakat agar tidak menyebar suatu informasi tanpa disertai bukti dan fakta bukan sekedar narasi-narasi yang belum jelas sumbernya.

4. Berita IV “Ketika Jokowi dan Prabowo Mengaku Kerap Dihina dan Diftinah”

Isi berita dalam Kompas.com dibawah ini yaitu, calon presiden no urut 01 Joko Widodo dan calon presiden no urut 02 Prabowo Subianto kerap mendapatkan fitnah, hoaks dan hinaan dari pihak yang tidak menyukai mereka, namun calon presiden no urut 01 Joko Widodo mengatakan akan melawan segala macam bentuk hoaks, hinaan dan fitnah yang ditujukan kepada dirinya. Sedangkan calon presiden no urut 02 Prabowo Subianto menegaskan kepada para pendukungnya untuk tidak mudah terpancing dengan isu-isu yang dari pihak yang ingin memperkeruh suasana politik.

Adapun berita selengkapnya sebagaimana tertulis ;

JAKARTA, KOMPAS.com - Serangan fitnah dan kabar bohong atau hoaks jelang Pilpres 2019 menjadi salah satu hal yang disoroti oleh calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Saat tampil di depan publik, keduanya menyinggung soal fitnah, hoaks dan hinaan yang ditujukan kepada diri mereka. Jokowi mengungkapkan, selama ini dirinya memilih diam ketika difitnah. Bahkan, saat dihina dan direndahkan, ia tetap memilih diam.

Hal itu ia diungkapkan Jokowi saat menghadiri deklarasi "Alumni Jogja SATUkan Indonesia", di Stadion Kridosono, Kota Yogyakarta, Sabtu (23/3/2019).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berjanji akan melawan segala macam hoaks, fitnah dan penghinaan yang sering ditujukan kepadanya selama ini.

Di hadapan peserta deklarasi Alumni Jogja SATUkan Indonesia Joko Widodo menyatakan tidak akan diam lagi.

"Saya ini sebenarnya sudah diam 4,5 tahun, difitnah- fitnah saya diam, dijelek-jelekin saya diam, dicela dan direndah-rendahkan saya diam. Dihujat-hujat, dihina-hina saya juga diam," ujar Jokowi.

Prabowo juga mengaku sering difitnah Tak hanya Jokowi, Prabowo juga mengaku dirinya sering diejek, dihina dan difitnah oleh pihak-pihak yang tidak menyukainya. Meski demikian, ia berusaha untuk tidak membalas fitnah tersebut.

"Saya sering diejek, saya sering dihina, saya sering difitnah tapi saya menahan diri. Saya menahan diri, saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa, yang benar adalah benar, yang tidak benar adalah tidak benar," ujar Prabowo saat kampanye di Lapangan Mandala, Kabupaten Merauke, Papua, Senin (25/3/2019).

Dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Prabowo tidak menjelaskan hal yang membuatnya dihina dan difitnah. Namun, dalam berbagai kesempatan Prabowo sering mengatakan, hinaan dan fitnah itu muncul karena ia sering mengkritik soal arah kebijakan ekonomi, kebocoran anggaran dan mengalirnya hasil kekayaan nasional ke luar negeri.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengajak pendukungnya untuk ikut bersama-sama menjaga persaudaraan meski berbeda pilihan. Menurut dia, toleransi adalah hal yang utama yang harus dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia demi keutuhan bangsa.

"Saya minta marilah kita tingkatkan rasa persaudaraan. Marilah kita memandang semua adalah saudara. Kita boleh berbeda agama, boleh berbeda suku, boleh berbeda bahasa tapi kita harus ingat, kita harus hidup mencari yang baik, hidup yang baik untuk anak-anak dan cucu cucu kita," kata Prabowo.

Selain itu, Ia juga meminta seluruh pendukungnya untuk menahan diri dan tidak mudah terpancing isu-isu dari pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana politik.

"Tidak mungkin kita bisa hidup baik kalau kita tidak hidup rukun. Kita harus selalu saling menghargai, saling mengasihi, saling membela, saling menjunjung tinggi dan kita harus menjaga perasaan kita. Kita harus sering menahan diri, sering kita harus mengalah, sering kita harus menjaga perasaan orang lain," ujar dia.

Akibat hoaks Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Ace Hasan Syadzily mengatakan, Jokowi akan terus melawan fitnah dan hoaks yang tersebar di tengah masyarakat.

Berbagai fitnah yang tersebar itu antara lain terkait isu Partai Komunis Indonesia (PKI), anti terhadap ormas Islam, kriminalisasi ulama, dan legalisasi perkawinan sesama jenis.

Ace mengatakan, berbagai hoaks dan fitnah terhadap Jokowi semakin menguat jelang pilpres.

Ia mencontohkan kasus video dugaan kampanye hitam yang dilakukan oleh ibu-ibu di Karawang, Jawa Barat.

Pak Jokowi tentu akan melawan siapa pun pihak yang mencoba untuk melakukan narasi negatif di Pemerintahan Jokowi ini," ujar Ace saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2019).

"Pak Jokowi dari 6 bulan lalu bicara tentang anti-hoaks, tetapi kita lihat sebulan yang lalu masih ada ibu-ibu yang mengkampanyekan soal hal-hal yang bersifat hoax terhadap Pemerintahan Jokowi," ujar dia.

Ace menilai, fitnah dan hoaks itu sengaja disebar oleh pihak tertentu untuk menutupi pencapaian pemerintah selama ini.

Akibatnya, masyarakat menjadi tidak objektif dalam menilai kinerja pemerintahan Presiden Jokowi.

"Hoaks tersebut itu menutupi objektivitas masyarakat untuk melihat secara objektif terhadap pemerintahan Jokowi yang dinilai publik banyak menghasilkan berbagai macam prestasi," kata Ace.

Di sisi lain, lanjut Ace, kampanye mencegah hoaks yang selama ini didengungkan tidak membuat penyebarannya surut.

Bahkan, penyebaran hoaks dinilai semakin marak jelang Pilpres pada 17 April 2019.

"Karena itulah (hoaks dan fitnah) yang dijadikan instrumen untuk menurunkan Pak Jokowi," kata politisi dari Partai Golkar itu.

Sementara, Juru Debat Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Sodik Mudjahid mengkritik pernyataan Jokowi terkait fitnah.

Menurut Sodik, Jokowi tidak menunjukkan sikap sebagai pemimpin negara yang harus tahan dengan fitnah dan hoaks.

Ia lantas membedakan cara Jokowi dan Prabowo dalam menghadapi fitnah.

"Prabowo difitnah selama 21 tahun dan 2 kali kalah dalam perjuangan akan tetapi jalan terus demi perjuangan rakyat," ujar Sodik melalui keterangan tertulis, Selasa (26/3/2019).

Namun, Sodik tidak menyebut fitnah apa yang menimpa Prabowo. Menurut Sodik, sebagai pemimpin, Jokowi harus bersabar.

"Pernyataan tersebut juga makin menunjukkan bahwa dia bukan bekerja untuk bangsa dan rakyat Indonesia tapi bekerja untuk kepentingan diri sendiri," kata Sodik.

Sodik mengatakan, pemimpin negara harus bisa mengenyampingkan masalah pribadinya. Kecuali, fitnah yang dimaksud Jokowi ditujukan untuk negara.

Fitnah terhadap negara memang harus dilawan oleh warga negara. "Pernyataan 'lawan' apalagi secara terbuka harusnya disampaikan bagi siapa saja yang menfitnah dan mengancam bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.

Bukan untuk mereka yang memfitnah dirinya sendiri," ujar Sodik

Berita ini diterbitkan oleh Kompas.com pada Selasa, 26 Maret 2019 pukul 10.55 WIB, dan diakses pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul 17.41 WIB.



Gambar 7 “Ketika Jokowi dan Prabowo Mengaku Kerap Dihina dan Diftinah”

Sumber : nasional.kompas.com

d. “Ketika Jokowi dan Prabowo Mengaku Kerap Dihina dan Diftinah”

1) Deskripsi Karakteristik Pesan Berita IV

a) *What?*

Unsur *what* pada berita diatas yaitu mengenai calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang kerap dihina dan diftinah dengan tindakan kabar bohong atau hoaks, fitnah dan hinaan menjelang pilpres 2019.

b) *How?*

Unsur *how* pada berita ini sesuai dengan judul berita yang mengatakan kedua pasangan calon presiden kerap dihina dan diftinah. Bentuk hinaan dan fitnah dijelaskan dalam isi berita yaitu calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo kerap dituduhkan berbagai fitnah yaitu antara lain terkait isu Partai Komunis indonesia (PKI), anti terhadap ormas islam, kriminalisasi ulama, dan legalisasi perkawinan sesama jenis. Namun Jokowi mengungkapkan, selama ini dirinya memilih diam ketika difitnah. Bahkan saat dihina dan direndahkan, ia tetap memilih diam. Hal itu diungkapkan Jokowi saat menghadiri deklarasi “Alumni Jogja SATUkan Indonesia”, di Satdion Kridosono, Kota Yogyakarta, Sabtu (23/3/2019). Namun capres nomor urut 01 ini dihadapan

peserta deklarasi Alumni Jogja SATUkan Indonesia menyatakan tidak akan diam lagi berjanji untuk melawan segala macam hoaks, fitnah dan penghinaan yang sering ditujukan kepada dirinya selama ini. Sedangkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto juga mengalami hal yang sama yaitu sering dihina dan difitnah oleh pihak yang tidak menyukainya. Hinaan dan fitnah yang sering muncul kepada dirinya karena ia sering mengkritik soal arah kebijakan ekonomi, kebocoran anggaran dan mengalirnya hasil kekayaan nasional keluar negeri. Kendati demikian, ia berusaha untuk tidak membalas fitnah tersebut. Seperti yang dikatakan calon presiden nomor urut 02 pada saat kampanye di Lapangan Mandala, Kabupaten Merauke, Papua, Senin (22/3/2019).

c) *To Whom?*

Unsur *to whom* pada pemberitaan ini yaitu tentu saja ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat baik itu pendukung calon presiden nomor urut 01 maupun pendukung calon presiden nomor urut 02. Agar tidak mudah tersulut opini yang mengarah pada tindakan ujaran kebencian berupa fitnah, hinaan serta berita yang belum tentu kebenarannya yang menyebabkan perpecahan ditengah perstauan bangsa.

2) Analisis Isi Pesan Pada Berita IV

Karakteristik pesan pada berita ini bersifat deskriptif dan informatif, karena pada berita IV menyajikan gambaran lengkap atau klarifikasi yang sesuai dengan judul berita serta memberikan informasi kepada para pembaca. Bahwasannya ketika para calon presiden mendapatkan fitnah dan hinaan dari pihak-pihak yang tidak menyukainya hanya akan memecah belah persatuan bangsa. Sepatutnya kita sebagai warga negara Indonesia, seperti semboyan kita Bhineka Tunggal Ika, Meski Berbeda-beda tapi Tetap Satu. Banyak perbedaan diantara kita sesama makhluk hidup. Belajar untuk saling menghargai, menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan menahan diri untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang belum tentu kebenarannya dan mengarah pada tindakan ujaran kebencian. Dengan adanya pemberitaan ini tentu *feedback* yang ditimbulkan ada yang pro dan kontra dari masing-masing tiap pendukung. Namun berita ini juga membuat para oknum-oknum pelaku tindak ujaran kebencian tidak lagi secara bebas melakukan fitnah dan hinaan karena telah dihimbau untuk tidak melakukannya dan akan di tindak tegas serta melawan kasus tindak ujaran kebencian.

5. Berita V “Agama untuk Pemilu Berjalan Damai, Jangan Pakai Sebarkan Kebencian”

Isi berita dalam Kompas.com dibawah ini yaitu, agama sejatinya menjadi salah satu penopang penguat dalam pemilu agar berjalan dengan damai bukan justru malah dijadikan bahan untuk menyebar kebencian ditengah masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi.

Adapun berita selengkapnya sebagaimana tertulis ;

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) sekaligus pengamat politik Ujang Komarudin menilai, agama sejatinya menjadi keselamatan di tengah masa Pemilu 2019, bukan menjadi alat untuk menyebar kebencian dan politik.

"Agama itu menjadi keselamatan untuk menjaga pemilu berjalan dengan damai. Maka, jangan gunakan agama dan simbol-simbolnya untuk menyebar kebencian, tuduhan, dan fitnah untuk tujuan politik," ujar Ujang dalam diskusi bertajuk

"Pilpres dan Politisasi Simbol Agama" di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2019).

Ia menyayangkan masih adanya simbol agama yang digunakan untuk menyebar kebencian dan politik, seperti tidak adanya adzan, zikir, dan tahlil jika pasangan calon tertentu kalah atau menang di Pilpres 2019. Adanya hoaks tersebut terjadi ke kedua paslon, baik Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Simbol-simbol tersebut, lanjutnya, sangat disayangkan terjadi. Masyarakat pun dinilai masih belum bisa membedakan mana fakta dan fiksi.

Maka dari itu, dibutuhkan integritas peserta pemilu yang fokus dalam memaparkan visi dan misi, bukan justru ikut dalam permainan oknum tertentu yang ingin memecah persatuan masyarakat.

"Ketika agama dipoles menjadi alat legitimasi, terjadi polarisasi antara kedua kubu paslon yang saat ini maju menjadi capres dan cawapres. Ini pemilu tergaduh yang pernah saya lihat," paparnya.

Agama itu, seperti diungkapkan Ujang, seharusnya menjadi sumber inspirasi dan ideologi. Hoaks, lanjutnya, berkembang karena agama tidak dijadikan dasar untuk menengahi polemik politik yang terjadi.

Berita ini diterbitkan oleh Kompas.com pada Kamis, 04 April 2019 pukul 18.43 WIB, dan diakses pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 22.44 WIB.

The image is a screenshot of a news article from Kompas.com. The browser address bar shows the URL: nasional.kompas.com/read/2019/04/04/18431131/agama-untuk-pemilu-berjalan-damai-jangan-pakai-sebarkan-kebencian. The article title is "Agama untuk Pemilu Berjalan Damai, Jangan Pakai Sebarkan Kebencian". The byline reads "Kompas.com - 04/04/2019, 18:43 WIB". There are social media sharing icons for Facebook and Twitter. The main image shows a group of people at a political rally holding various banners. One prominent banner says "HOAX PRODUSENYA JAHAT, PENERAPNYA BEJAT PERCAYA? BODOH PALE...". Other banners include "PEMILU GEMBIRA", "KITA KITA INDONESIA", and "PERCAYA?". To the left of the main image is a WWF advertisement with the text "#Reduce Your Use" and "Click here". To the right is an advertisement for "AUTOMATING THE FUTURE OF WORK" with the subtitle "The Rise of Digital Workers".

Gambar 8 “Agama untuk Pemilu Berjalan Damai, Jangan Pakai Sebarkan Kebencian”

Sumber : nasional.kompas.com

e. “Agama untuk Pemilu Berjalan Damai, Jangan Pakai Sebarkan Kebencian”

1) Deskripsi Karakteristik Pesan Berita V

a) *What?*

Unsur *what* pada berita diatas menggambarkan bahwa agama sejatinya menjadi penjaga setiap individu seseorang. Dengan adanya agama bisa mengontrol dalam melakukan tindakan. Pada kesempatan pemilu tentunya harus menjadi salah satu faktor penyelamat agar pemilu bisa berjalan dengan lancar. Hal ini selaras dengan penyampaian Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR).

b) *How?*

Unsur *how* pada berita diatas bahwasannya peyampaian isu yang tersebar melalui hoaks-hokas yang beredar seolah menjadikan agama sebagai salah satu alat penyambung hoaks dengan memakai simbol salah satu agama di Indonesia, yaitu menyebutkan bahwa ketika pasangan kubu 01 atau kubu 02 menjadi pasangan terpilih maka adzan,dzikir dan tahlil tidak akan terdengar lagi di Indonesia. Hal ini sangat bertentangan sekali, karena Negara Indonesia sendiri adalah salah satu Negara dengan masyarakat muslim terbesar di dunia.

c) To Whom?

Unsur *to whom* pada berita diatas memaknai isi berita tersebut menjadi salah satu pandangan politik terlebih untuk pemilu 2019. Pesan yang disampaikan ini ditujukan kepada peserta pemilu, agar tidak mudah terpancing dan terprovokasi sehingga bisa berpengaruh dalam memilih pasangan presiden.

2) Analisis Isi Pesan Pada Berita V

Karakteristik pesan pada berita diatas bersifat informatif dan persuasif. Karena menjadikan agama sebagai alat poles dalam pemilu, tentu tindakan yang tidak patut dicontoh. Terlepas dengan aksara untuk mendapatkan suara tindakan ini sangat tidak pantas. Ada banyak faktor yang membuat hal tersebut tidak baik yaitu, Indonesia terkenal dengan keseragaman beragama, Indonesia salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar, dan isu ini membuat umat muslim menjadi marah dan memancing kerusuhan serta amarah. Dengan adanya pemberitaan ini tentu saja efeknya memberikan opini-opini yang polemik dari masyarakat.

6. Berita VI “Posting Ujaran Kebencian Capres, Pemilik Akun Antonio Banerra Diringkus Polisi”

Isi berita dalam Kompas.com dibawah ini yaitu, seorang pria dengan nama akun facebook Antonio Banerra diringkus polisi karena dalam postingannya melakukan tindak ujaran kebencian pada salah satu pasangan calon presiden peserta pemilu 2019 dan menyinggung serta memojokan etnis tertentu.

Adapun berita selengkapnya sebagaimana tertulis ;

SURABAYA, KOMPAS.com - AKR, pria berusia 36 tahun diamankan Tim Siber Ditreskrimsus Polda Jatim Sabtu (6/4/2019) malam di tempat kostnya di Sidoarjo. Pria pengangguran itu dilaporkan telah memposting konten ujaran kebencian pada salah satu pasangan capres cawapres peserta Pemilu 2019.

Dalam postingannya, AKR yang menggunakan akun Facebook dengan nama "Antonio Banerra" itu mengajak netizen untuk mencoblos salah satu capres, agar tragedi 1998 kembali terjadi di Indonesia. Dalam postingannya, dia juga menyinggung dan memojokkan etnis tertentu.

"Postingannya bernuansa SARA dan menyinggung kelompok tertentu," Kata Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Frans Barung Mangera, Minggu (7/4/2019).

Kasus ujaran kebencian itu kata Barung menjadi atensi Mabes Polri, karena itu dalam penangkapan pelaku, melibatkan jajaran Polrestabes Surabaya, Polda Jatim hingga tim Siber Bareskrim Mabes Polri. Kepada polisi, pelaku mengaku sengaja memposting konten ujaran kebencian tersebut karena keluarganya ada yang menjadi korban tragedi 1998. "Itu pengakuan pelaku, motifnya masih terus kami dalami," terangnya.

Tim gabungan Polri kata dia sebenarnya juga menangkap PA, isteri pelaku di tempat kostnya Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Namun hasil pemeriksaan, isterinya tidak terkait langsung dengan aktivitas pelaku, sehingga PA isteri pelaku dilepas. Pelaku kini diamankan di Polda Jatim untuk diperiksa intensif. AKR yang dalam catatan polisi adalah residivis kasus penggelapan.

Dia dijerat pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE), dengan ancaman hukuman maksimal di atas 5tahun penjara.

Berita ini diterbitkan oleh Kompas.com pada Minggu, 07 April 2019 pukul 13.05 WIB, dan diakses pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 22.49 WIB.



Gambar 9 “Posting Ujaran Kebencian Capres, Pemilik Akun Antonio Banerra Diringkus Polisi”
Sumber : nasional.kompas.com

f. “Posting Ujaran Kebencian Capres, Pemilik Akun Antonio Banerra Diringkus Polisi”

1) Deskripsi Karakteristik Pesan Berita VI

a) *What?*

Unsur *what* pada berita diatas menjelaskan bahwa akun facebook bernama “Antonio Banerra” ditangkap polisi karena postingan ujaran kebencian yang ia posting dari laman facebook. Antonio dalam postingannya mengajak netizen untuk memilih salahsatu capres. Tujuan yang ia lakukan agar tragedi pada tahun 1998 kembali terjadi, pelaku ujaran kebencian Antonio mengatakan ia sengaja memposting konten tersebut, karena keluarganya ada yang menjadi korban tragedi 1998.

b) *How?*

Unsur *how* pada berita diatas yaitu Arif Kurniawan Radjasa, dengan nama facebook Antonio Banerra memposting ujaran kebencian di laman facebooknya pada (6/4/2019) “Postinganya bernuanasa SARA dan menyinggung kelompok tertentu,” Kata Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Frans Barung Mangera, Minggu (7/4/2019). Kasus ujaran kebencian itu kata Barung menjadi atensi Mabes Polri, karena itu dalam penangkapan pelaku melibatkan jajaran Polrestabes Surabaya, Polda Jatim hingga tim Siber

Bareskrim Polri Kepada polisi, pelaku mengaku sengaja memposting konten ujaran kebencian tersebut karena keluarganya ada yang menjadi korban tragedi 1998.

c) *To Whom?*

Sosial media fungsinya menjadi tempat untuk saling berbagi, baik itu informasi/hiburan. Menggunakan sosial media sejatinya sesuai dengan fungsinya, karena jika dijadikan tempat untuk membagi berita bohong, memposting ujaran kebencian tentu akan berdampak besar terhadap para pembaca, keluarga dan orang-orang terdekat. Kasus yang dialami oleh Antonio Banerra sebagai unsur *to whom* pada berita diatas yang tentu menjadi pelajaran besar bagi kita pengguna sosial media agar tidak melakukan tindakan yang sama. Bukan hanya tindakan tersebut tidak baik, tetapi ada juga UU ITE yang bisa meringkus pelaku ujaran kebencian.

2) Analisis Isi Pesan Pada Berita VI

Karakteristik pesan pada berita diatas bersifat informatif, seperti yang kita ketahui Indonesia adalah negara berlandaskan hukum. Semua tindakan yang dilakukan ada hukum yang menaunginya. Dalam tindakan ujaran kebencian contohnya pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) jika dilanggar terjerat ancaman hukuman

maksimal diatas 5 tahun penjara. Sebagai warga negara yang baik, harusnya masyarakat bisa memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada, jika sosial media dijadikan tempat ujaran kebencian seperti yang dilakukan Antonio maka akan berdampak kepada semua orang yang membaca, karena pada dasarnya sosial media tidak ada filter. Jika hal ini terjadi, maka para penerus bangsa akan bermental tempramen dan berburuk sangka. Dengan adanya pemberitaan ini diharapkan memberikan efek jera kepada para oknum yang belum bisa menggunakan sosial media untuk hal-hal positif.

7. Berita VII “Ikut Bahas Ujaran Kebencian Capres, JM Warga Nganjuk Diringkus Polisi”

Isi berita dalam Kompas.com dibawah ini yaitu, JM pemilik akun facebook Adhiganjuk warga Nganjuk, Jatim diringkus polisi karena ikut menanggapi postingan AKR pemilik akun facebook Antonio Banerra yang melakukan tindak ujaran kebencian pada salah satu capres serta memojokan etnis tertentu.

Adapun berita selengkapnya sebagaimana tertulis ;

SURABAYA, KOMPAS.com - Tim Siber Ditreskrimsus Polda Jatim, kembali menangkap pelaku kasus ujaran kebencian, terhadap salah satu calon presiden di Pilpres 2019 yang disebarkan pelaku AKR. Sabtu (6/4/2019) lalu.

JM, pemilik akun fecebook adhiganjuk, warga Nganjuk, Jatim, diamankan petugas, Minggu (7/4/2019) sore, karena menanggapi postingan AKR.

Dalam postingannya, keduanya membahas jika salah satu capres yang terpilih, maka tragedi kerusuhan 1998 akan kembali pecah. Pembahasan juga memojokkan etnis tertentu.

"Pemilik akun berinisial JM kami amankan di Nganjuk Minggu sore," kata Kombes Akhmad Yusep Gunawan, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim, Senin (8/4/2019). Yusep menambahkan, pria berinisial JM, ditangkap di rumahnya di desa Karangsono, Kecamatan Loceret, Nganjuk, Jawa Timur.

"Selain diperiksa perihal postingannya di media sosial, JM diperiksa perihal hubungannya dengan AKR," terang Yusep. Sabtu lalu, tim siber gabungan Polda Jatim, Mabes Polri dan Polrestabes Surabaya menangkap AKR pemilik akun facebook Antonio Banerra di tempat kostnya, di Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Sidoarjo Jawa Timur.

Pria pengangguran itu, dilaporkan telah memposting konten ujaran kebencian pada salah satu pasangan capres cawapres peserta Pemilu 2019.

Dalam postingannya, AKR mengajak netizen untuk mencoblos salah satu capres, agar tragedi 1998 kembali terjadi di Indonesia. Dia juga menyinggung dan memojokkan etnis tertentu.

AKR dan JM dijerat pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE), dengan ancaman hukuman maksimal di atas 5 tahun penjara.

Berita ini diterbitkan oleh Kompas.com pada Senin, 08 April 2019 pukul 11.23 WIB, dan diakses pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 22.51 WIB.



Gambar 10 “Ikut Bahas Ujaran Kebencian Capres, JM Warga Nganjuk Diringkus Polisi”

Sumber : nasional.kompas.com

g. “Ikut Bahas Ujaran Kebencian Capres, JM Warga Nganjuk Diringkus Polisi”

1) Deskripsi Karakteristik Pesan Berita VII

a) *What?*

Unsur *what* pada berita VII menggambarkan bahwa ujaran kebencian, ternyata berdampak sangat besar bagi para pembaca. Jika netizen (pengguna sosial media) tidak pandai dalam melihat sebuah postingan tentu akan terpengaruh dan percaya dengan postingan yang mereka baca. Seperti yang dialami oleh JM, pemilik akun facebook Adhiganjuk, warga

Nganjuk, Jatim diamankan petugas, Minggu (7/4/2019) sore, karena menanggapi postingan AKR. Dalam postingannya, keduanya membahas jika salah satu capres yang terpilih, maka tragedi kerusuhan 1998 akan kembali pecah. Pembahasan juga memojokan etnis tertentu.

b) *How?*

Unsur *how* pada berita ini yaitu, pemilik akun berinisial JM juga diringkus oleh pihak kepolisian di Nganjuk karena ikut menanggapi postingan AKR pemilik akun facebook bernama Antonio Banerra yang dalam postingan tersebut membahas jika salah satu capres terpilih maka tragedi kerusuhan 1998 akan kembali terjadi dan dalam pembahasan tersebut juga memojokan etnis tertentu.

c) *To Whom?*

Pemberitaan yang dibahas pada berita VII untuk unsur *to whom* tidak menyebutkan jelas kepada siapa berita ini ditujukan namun kita sebagai pembaca bisa mencerna berita yang ada bahwa kita sebagai pengguna sosial media harus cermat dalam menerima informasi dan harus bijak dalamanggapi isu-isu yang ada, jangan mudah terbawa arus pemberitaan yang bisa menyulut amarah banyak pihak, baik dari kalangan yang pro maupun kontra.

2) Analisis Isi Pesan Pada Berita VII

Karakteristik pesan pada berita ini yaitu bersifat informatif. Karena dengan adanya pemberitaan ini membuat kita sebagai pengguna sosial media pada zaman teknologi ini agar bisa menggunakan serta memanfaatkan kemajuan teknologi untuk hal yang lebih bermanfaat serta lebih berhati-hati, tidak merugikan pihak tertentu dengan opini-opini yang menjurus kepada tindakan ujaran kebencian. Sebagaimana hukum yang berlaku jika terjadi tindakan penyalagunaan teknologi maka akan dijera pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman maksimal diatas 5 tahun penjara. Pemberitaan ini adalah sebagai salah satu contoh dari tindak ujaran kebencian yang memberikan efek kepada para pembaca membuat terpancing emosinya dengan postingan-postingan yang menjurus kepada perpecahan dan merugikan pihak yang bersangkutan.

B. Hasil Kesimpulan Analisis Isi Berita Kompas.com Mengenai Ujaran Kebencian Menjelang Pilpres 2019.

Dari hasil penelitian pada tujuh berita di media *online* Kompas.com mengenai ujaran kebencian menjelang pilpres 2019 yang telah diuraikan diatas dengan menggunakan fokus analisis isi menurut teori Holsti (1969), dengan teori ini peneliti mampu menguraikan secara rinci isi dari tiap berita.

Hadirnya media *online* Kompas.com sebagai perantara informasi kepada masyarakat seperti yang dapat dilihat dari isi pesan yang disampaikan media kepada pembaca sudah jelas dan mampu memberikan gambaran, wawasan serta peringatan kepada para pembaca yang tujuannya sama yaitu agar lebih bijak dalam menggunakan teknologi serta bersikap lebih saling menghargai, menjaga persaudaran dan tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang belum tentu kebenarannya di tengah masyarakat menjelang pesta demokrasi.

Berdasarkan hasil temuan menggunakan teori Holsti mengenai pemberitaan ujaran kebencian menjelang pilpres 2019 di media *online* Kompas.com dapat diuraikan sebagai berikut.

Pada berita pertama, informasi yang disampaikan melalui pemberitaan mengenai 90 Daerah Rawan Tinggi Isu Ujaran Kebencian dan SARA yang disampaikan oleh Bawaslu bahwasannya tindakan tersebut sering muncul dan menjadi kerawanan ketika menjelang pesta demokrasi.

Pada berita kedua, yang disampaikan melalui berita ini adalah calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyuarakan kepada para pendukungnya untuk jangan sebar ujaran kebencian baik di media sosial maupun ditempat lainnya dan mengajak seluruh pendukungnya untuk bersikap santun dalam menyampaikan informasi.

Pada berita ketiga, Polri menegaskan netral dalam pemilu serta mengklarifikasi bahwa narasi yang beredar ditengah masyarakat, mengatakan polisi mendukung salah calon presiden adalah hoaks dan pihak Polri juga menjalin kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara untuk melakukan kanalisasi berita hoaks dan ujaran kebencian.

Pada berita keempat, para calon presiden baik nomor urut 01 Joko Widodo dan nomor urut 02 Prabowo Subianto kerap mendapatkan hinaan dan fitnah dari oknum-oknum yang tidak menyukai mereka. Namun calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengatakan akan memberantas oknum yang melakukan segala bentuk hoaks, fitnah dan hinaan kepada dirinya. Sedangkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyuarakan kepada para pendukungnya untuk menahan diri dan tidak mudah terpancing dengan isu yang ingin memperkeruh suasana politik.

Pada berita kelima, pemberitaan mengharapkan agama menjadi salah satu tumpu untuk menjaga keselamatan pemilu bukan malah sebagai alat untuk menyebarkan hoaks serta ujaran kebencian, seperti yang dikatakan dalam pemberitaan jika salah satu pasangan calon presiden tertentu kalah

atau menang maka tidak adanya adzan, dzikir, dan tahlil. Masyarakat harus mampu membedakan mana fakta dan fiksi.

Pada berita keenam, seorang pria berusia 36 tahun berinisial AKR dengan nama akun facebook Antonio Banerra diringkus polisi karena dalam postingannya mengajak netizen untuk mendukung salah satu capres agar tragedi 1998 kembali terjadi dan dalam postingan tersebut ia juga menyinggung dan memojokan etnis tertentu.

Pada berita ketujuh, JM pemilik akun facebook Adhiganjuk, warga Nganjuk, Jatim diamankan polisi karena ikut menanggapi postingan AKR pemilik akun facebook bernama Antonio Banerra yang dalam postingan tersebut keduanya membahas jika salah satu capres terpilih maka tragedi 1998 kembali terjadi serta dalam postingan tersebut juga memojokan etnis tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa dalam setiap pemberitaan terkait ujaran kebencian menjelang pilpres 2019 yang diterbitkan media *online* Kompas.com memberikan kualitas berita yang mampu dipahami oleh pembaca menggunakan bahasa yang lugas dan menyajikan berita yang aktual dan faktual. Serta telah memenuhi karakteristik pesan suatu berita yang objektif, sistematis dan generalis serta mengandung unsur (*what, how* dan *to whom*) sebagaimana teori analisis isi yang dipakai oleh Holsti.